

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Rp5 Miliar untuk Influencer Dihapus

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk lima influencer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro mengungkapkan anggaran sebanyak itu rencananya untuk promosi pariwisata melalui lima influencer.

Namun, usulan melalui Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020 itu sudah dicoret atau dibatalkan. Artinya, Pemprov DKI tidak akan menyewakan influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI. "Yang jelas, sekarang anggaran itu sudah tidak ada atau dihapus," tegasnya.

Asiantoro mengatakan, ren-

cananya lima influencer itu direkrut karena memiliki jumlah *followers* terbanyak. Sayangnya, dia enggan menjelaskan jumlah minimum *followers* influencer itu yang akan diundang DKI. "Tadinya influencer luar negeri yang mempunyai *followers* banyak, tapi sekarang kan sudah *nggak* ada kegiatan itu," ungkapinya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Padapotan Sinaga terkejut mendengar rencana Pemprov DKI mengundang influencer dalam mempromosikan pariwisata sebesar Rp5 miliar untuk lima orang. Dia pun mempertanyakan dalam pembahasan anggaran yang rencananya akan dimulai pada Senin (29/10). "Buat apa anggaran influencer dalam mempromosikan pariwisata? Itu pemborosan," katanya.

Padapotan menjelaskan, KUA-PPAS itu merupakan sebuah kerangka rencana kegiatan yang diusulkan oleh eksekutif. Seharusnya dalam menyusun rencana itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memilih mana kegiatan yang bermanfaat mana yang hanya pemborosan. "Meski sudah dihapus, kami akan tetap mempertanyakan mengingat dirinya sudah memegang draf KUA-PPAS yang diusulkan sejak awal oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mengundang influencer merupakan bentuk pemborosan anggaran. Seharusnya pemerintah menggandeng pihak swasta

dalam membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota. "Kalau berkolaborasi itu bukan dengan APBD, meskipun nantinya anggaran itu dicoret, tetap saja DKI telah berencana," ungkapnya.

Trubus menjelaskan, sebagai pembuat kebijakan, Pemprov DKI memiliki kuasa untuk mengajak pihak swasta bekerja sama dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan. Di sisi lain, pihak swasta akan menyambut baik ajakan DKI karena kehadiran wisatawan juga berimplikasi terhadap produk dari usaha mereka. "Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk promosi karena pihak swasta akan membantunya lewat dana sosial atau *corporate social responsibility*," tandasnya.

bima setiyadi